Penanganan Covid-19 Jadi Isu Sentral Pilkada Serentak 2020

Senin, 29 Juni 2020

Penanganan Covid-19 berpotensi menjadi isu sentral dalam Pilkada Serentak 2020. Mendagri M. Tito Karnavian menilai bahwa mengangkat isu ini akan mendorong kontestan untuk beradu ide dalam pengendalian dan penanganan pandemi. Hal ini dianggap tepat karena Covid-19 merupakan musuh bersama yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

Mendagri berharap munculnya inovasi dan program dari para kontestan untuk membangun kenormalan baru serta mengatasi dampak Covid-19, termasuk masalah ekonomi. Tantangan ini dihadapi baik oleh petahana maupun calon baru.

Namun, di sisi lain, pandemik Covid-19 diprediksi tidak akan menurunkan jumlah pelanggaran Pilkada. Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, menyatakan bahwa dugaan pelanggaran politisasi bantuan sosial masih menjadi perhatian. Bawaslu meminta Kemendagri untuk tegas dalam menerapkan sanksi berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Hingga Mei 2020, Bawaslu mencatat lebih dari 500 dugaan pelanggaran, termasuk pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana. Selain itu, terdapat juga pelanggaran netralitas ASN.

Peningkatan jumlah pelanggaran ini menjadi sorotan penting dalam Pilkada 2020. Bawaslu dan Kemendagri perlu bekerja sama untuk mencegah dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.